

KONTRAK TENAGA HARIAN LEPAS PADA DINAS LINGKUNGAN
HIDUP DAN KEBERSIHAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR DITINJAU
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003
TENTANG KETENAGAKERJAAN

SKRIPSI

Untuk memenuhi sebagian persyaratan
untuk mencapai derajat S-1 pada
Program Studi Ilmu Hukum



Oleh :

ARIYA TEKAD PRAMESTI
NPM : 44791751FH13

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI
SELONG
2017

Halaman pengesahan

KONTRAK TENAGA HARIAN LEPAS PADA DINAS
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KABUPATEN
LOMBOK TIMUR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN



OLEH
ARIYA TEKAD PRAMESTI
NPM : 44791751 FH-13

Mengetahui

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'L.M. FAISAL SH, MH', written over a horizontal line.

L.M. FAISAL SH, MH

NIDN : 081027201

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI

TIM PENGUJI

1. Ketua :

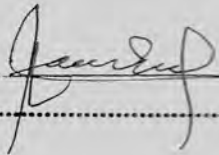
(JOHAN MALIGAN,SH.,MH.)
NIDN : 0825056001



(.....)

2. Anggota I ;

(HAERUDIN, SH.,MH.
NUPN: 9908001990



(.....)

3. Anggota II :

(L.M. FAISAL, SH.,MH)
NIDN : 081027201



(.....)

SKRIPSI INI TELAH DITERIMA DAN DISAHKAN OLEH :
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI
PADA TANGGAL :



JOHAN, S.H.,M.H.
NIDN : 0825056001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
LEMBAR PENYELENGGARAAN SKRIPSI.....	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan.....	8
D. Ruang Lingkup Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Ketenagakerjaan	10
B. Jenis Tenaga Kerja.....	12
C. Hubungan Kerja	13
D. Perjanjian Kerja	14
E. Pengupahan	18
F. Hubungan antara Pendidikan, Umur dan Penilaian Kerja dengan perpanjangan kontrak tenaga kerja harian lepas	23
BAB III METODE PENULISAN	
A. Jenis Penulisan	26
B. Metode Pendekatan	26

C. Sumber dan Jenis Data	27
D. Teknik dan Alat Pengumpulan Data	28
E. Analisis Data.....	29

BAB IV. HASIL PENULISAN DAN PEMBAHASAN

A. Status Tenaga Kontrak Kerja Di Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kabupaten Lombok Timur Ditinjau dari UUNomor 13 Tahun 2003	33
B. Alasan Dibentuknya Hubungan Kontrak Kerja Tenaga Harian Lepas Pada Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kabupaten Lombok Timur.....	37

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	48
B. Saran.....	49

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang atas limpahan Rahmat, Taufik, Hidayah, dan InayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah pada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW, beserta seluruh keluarganya, sahabat- sahabatnya dan para pengikutnya sampai akhir jaman.

Dalam menulis skripsi ini penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh daripada sempurna dan masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari semua pihak, demi kesempurnaan skripsi ini.

Seluruh proses dalam rangka penulisan ini telah diselenggarakan dalam suasana keterbatasan dan hambatan yang tidak mudah, namun demikian semua itu dapat dilalui berkat dukungan dan motivasi yang diberikan dengan tulus oleh Universitas Gunung Rinjani pada umumnya dan Akademik Fakultas Hukum pada khususnya, serta oleh para pihak seperti keluarga, teman dan kerabat lainnya. Mereka semua pada dasarnya adalah pahlawan yang sangat berjasa bagi penulis atau tidak mungkin disebutkan satu persatu. Walau demikian penulis selalu berharap semoga bantuan dan motivasi itu tidak mubazir tetapi selalu tercatat sebagai amal dan ibadah kebaikan.

Dengan terselesaikannya skripsi ini,penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan bimbingan dan saran serta informasi yang sangat berharga kepada penulis yaitu :

1. Bapak Johan Maligan, SH.MH selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir dengan penulisan skripsi ini.
2. Bapak L.M. Faisal, SH.MH. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan pembimbingan sejak awal sehingga tersusunnya laporan hasil penelitian ini dan telah membimbing dengan sabar dan penuh niat baik
3. Untuk orang tua, istri, anak, teman-teman sejawat yang senantiasa selalu memberikan dukungan dan doanya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Akhirnya penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, mudah-mudahan apa yang telah diberikan dapat menjadi amal ibadah dan mendapat ridho dari Allah SWT. Amin
Ya Rabbal Alamin.

Selong, November 2017
Penulis

ARIYA TEKAD PRAMESTI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kependudukan merupakan salah satu masalah-masalah yang serius untuk ditangani. Hal ini karena pertumbuhan penduduk yang tinggi dapat menghambat pertumbuhan sosial ekonomi masyarakat. Jumlah penduduk yang sangat besar menimbulkan beberapa pandangan dari para pakar kependudukan. Pendapat pertama menyatakan bahwa dengan jumlah penduduk yang besar akan menimbulkan beberapa masalah dalam pembangunan dengan alasan semakin besar jumlah penduduk maka pendapatan perkapita akan semakin menurun. Pendapat kedua menyatakan bahwa apabila terdapat jumlah penduduk yang besar maka dapat dipakai sebagai modal manusia (*labour resources*), dalam jangka waktu yang relative pendek. Pendapat ini cukup beralasan, karena apabila penduduk mempunyai kualitas tinggi, maka hal tersebut dapat mempercepat laju pertumbuhan sosial-ekonomi. Namun pada kenyataannya jumlah penduduk yang besar seringkali bersifat sebagai beban daripada modal pembangunan.

Masalah ketenagakerjaan di Indonesia sekarang ini sudah mencapai kondisi yang cukup memprihatinkan ditandai dengan jumlah penganggur dan setengah penganggur yang besar, pendapatan yang relatif rendah dan kurang merata. Sebaliknya pengangguran dan setengah pengangguran yang tinggi merupakan pemborosan sumber daya dan potensi yang ada, menjadi beban keluarga dan masyarakat, sumber utama kemiskinan, dapat mendorong

peningkatan keresahan sosial dan kriminal, dan dapat menghambat pembangunan dalam jangka panjang.

Pembangunan bangsa Indonesia kedepan sangat tergantung pada kualitas sumber daya manusia Indonesia yang sehat fisik dan mental serta mempunyai ketrampilan dan keahlian kerja, sehingga mampu membangun keluarga yang bersangkutan untuk mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang tetap dan layak, sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup, kesehatan dan pendidikan anggota keluarganya.

Dalam pembangunan Nasional, kebijakan ekonomi makro yang bertumpu pada sinkronisasi kebijakan fiskal dan moneter harus mengarah pada penciptaan dan perluasan kesempatan kerja. Untuk menumbuh kembangkan usaha mikro dan usaha kecil yang mandiri perlu keberpihakan kebijakan termasuk akses, pendamping, pendanaan usaha kecil dan tingkat suku bunga kecil yang mendukung. Kebijakan Pemerintah Pusat dengan kebijakan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota harus merupakan satu kesatuan yang saling mendukung untuk penciptaan dan perluasan kesempatan kerja¹.

¹ Depnakertrans, 2004. *Penanggulangan Pengangguran di Indonesia*, Majalah Nakertrans Edisi – 03 TH.XXIV – Juni.

Tabel 1.1. Tenaga Kerja Indonesia

Tahun	2010	2011	2012	2013	2014
Tenaga Kerja	116.527.546	120.320.000	119.399.375	120.170.000	121.870.000
- Bekerja	108.207.767	111.281.744	113.010.000	112.760.000	114.630.000
- Pengangguran	7.240.000	7.310.000	7.410.000	8.117.631	8.319.779

Sumber : Badan Pusat Statistik²

Sampai dengan akhir tahun 2014 lalu tenaga kerja Indonesia tercatat 121.870.000 jiwa menurut hasil registrasi oleh Badan Pusat Statistik. Sedangkan hasil proyeksi jumlah tenaga kerja Indonesia yang dilakukan Badan Pusat Statistik pada tahun 2010 didapat bahwa jumlah tenaga kerja Indonesia sebesar 116.527.546 jiwa. Jumlah tenaga kerja di Indonesia cenderung selalu meningkat.

Penerimaan tenaga kerja merupakan salah satu faktor pendukung pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh Negara-negara berkembang mempunyai tujuan antara lain untuk menciptakan perkembangan ekonomi yang hasilnya merata. Tenaga kerja adalah seluruh jumlah penduduk yang dianggap dapat bekerja dan sanggup bekerja jika tidak ada permintaan kerja. Menurut Undang-Undang Tenaga Kerja, mereka yang dikelompokkan sebagai tenaga kerja yaitu mereka yang berusia antara 15 tahun sampai dengan 64 tahun³.

² Badan pusat Statistik (BPS), 2016. Diakses dari bps-file (1) from <https://lomboktimurkab.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/34>, diambil 13 april 2017 pada pukul 22.30 WITA

³ Google 2017 (Wikipedia), Pengertian tenaga kerja, from https://id.wikipedia.org/wiki/Tenaga_kerja diambil tanggal 13 april 2017 pada pukul 22.00 Wita

Keadaan atau kondisi kependudukan yang ada sangat mempengaruhi dinamika pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah. Jumlah penduduk yang besar, jika diikuti dengan kualitas penduduk yang memadai, akan menjadi pendorong bagi pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, jumlah penduduk yang besar jika diikuti dengan kualitas yang rendah, menjadikan penduduk tersebut sebagai beban bagi pembangunan nasional.

Banyaknya tenaga kerja yang terserap oleh suatu sektor perekonomian, dapat digunakan untuk menggambarkan daya serap sektor perekonomian tersebut terhadap angkatan kerja. Ketidakseimbangan antara pertumbuhan angkatan kerja dan penciptaan lapangan kerja akan menyebabkan tingginya angka pengangguran. Kemudian meningkatnya angka pengangguran akan mengakibatkan pemborosan sumber daya dan potensi angkatan kerja yang ada, meningkatnya beban masyarakat, merupakan sumber utama kemiskinan dan mendorong terjadinya peningkatan keresahan social, serta menghambat pembangunan ekonomi dalam jangka panjang.

Kabupaten Lombok Timur saat ini merupakan kabupaten yang sedang berkembang baik disektor ekonomi, pendidikan, perdagangan, pertanian dan pariwisata. Ini terlihat dari pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2013-2015 yang mengalami peningkatan yang dapat dilihat dari pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lombok Timur.

Table 1.2 Realisasi Pendapatan Asli Daerah

Jenis Pendapatan	2013	2014	2015
Pendapatan Asli daerah (PAD)	97.249,11	180.308,18	189.270,75
Pajak daerah	15.095,13	26.037,35	27.993,56
Retribusi daerah	32.928,05	24.999,41	31.515,59
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	10.635,47	10.984,29	15.293,36
Lain-lain PAD yang syah	38.590,47	118.287,14	114.468,24

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Lotim⁴

Pada table 1.2 pendapatan asli daerah di Kabupaten Lombok timur mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2013-2015. Pada table tersebut tertera retribusi daerah, biasanya masalah retribusi berkaitan dengan kebersihan. Dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan juga turut andil dalam peningkatan PAD Kabupaten Lombok Timur. Tidak hanya itu saja Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan juga membantu peningkatan perekonomian di Kabupaten Lombok Timur yaitu dengan membuka lapangan pekerjaan untuk mengurangi banyaknya jumlah pengangguran.

Pemerintah daerah memberikan kesempatan kepada masyarakat yang membutuhkan pekerjaan untuk diseleksi atau melamar pekerjaan menjadi tenaga kerja harian lepas pada Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan.

⁴ Badan Pusat Statistik, 2016. *Katalog BPS Statistik Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016*. (Lombok Timur : BPS Kab. Lombok Timur) hal 59.

Baik itu untuk yang hanya mempunyai Ijazah SD atau SMP akan tetapi sampai Ijazah perguruan tinggi pun bisa ikut andil dalam mencari pekerjaan disini. Tenaga kerja harian lepas yang dimaksud tidak sama dengan outsourcing atau bukan outsourcing, yaitu tenaga kerja kontrak yang didasarkan pada peraturan jam kerja.

Tenaga kerja harian lepas bertugas membersihkan atau menyapu jalan raya di Kota Selong dan sekitarnya yang biasanya disebut tenaga penyapu jalan. Tidak hanya sebagai penyapu jalan tetapi tenaga kerja harian lepas Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan juga ada yang bertugas sebagai ABK (anak buah kendaraan), sopir, operator motor sampah, kolektor retribusi, dll. Pada saat ini tenaga harian lepas di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan berjumlah 245 orang yang memiliki jam kerja yang sudah diatur oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan. Selain itu berdasarkan informasi yang kami ketahui bahwa sekarang ini tenaga kerja harian lepas sudah berubah statusnya menjadi tenaga kontrak.

Dengan jam kerja dan pembagian tugas yang sudah diatur oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan itu sendiri, pada setiap tahunnya tenaga kerja harian lepas atau tenaga kontrak yang ada Dinas tersebut mendapatkan surat perpanjangan kontrak berupa Surat Keputusan (SK) Tahunan, baik itu dari Kantor Dinas lingkungan Hidup dan Kebersihan ataupun yang berasal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur. Dengan diberikannya SK tersebut maka tenaga kerja yang ada di Dinas tersebut dapat melanjutkan tugas yang telah ditentukan. Hal yang menjadi pertanyaan bagi penulis adalah

apakah ada hal-hal yang menjadi pertimbangan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan ataupun Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur untuk memperpanjang SK Tahunan tersebut, dikarenakan terkadang ada beberapa tenaga kerja yang tidak mendapatkan SK kembali atau terkadang dipindah tugaskan ke bagian yang lain.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis ingin meneliti tentang faktor apa saja yang mempengaruhi perpanjangan kontrak tenaga kerja harian lepas di Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kabupaten Lombok Timur dalam bentuk skripsi dengan judul **“Kontrak Tenaga Harian Lepas Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Lombok Timur Ditinjau dari Undang-undang nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat disusun rumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimanakah status kontrak kerja harian lepas pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Lombok Timur ditinjau dari UU Nomor 13 tahun 2003?
2. Apakah alasan dibentuknya hubungan kerja kontrak di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Lombok Timur ?

C. Tujuan Dan Manfaat

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah ;

- a. Untuk mengetahui status kontrak kerjaharian lepas di Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kabupaten Lombok Timur ditinjau dari UU nomor 13 tahun2003
- b. Untuk mengetahui alasan dibentuknya hubungan kerja kontrak di Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kabupaten Lombok Timur

2. Manfaat penelitian

Manfaat penelitian ini dapat digunakan sebagai:

- a. Sumbangan bagi pemerintah daerah maupun instansi dalam menetapkan kebijakan khususnya di bidang ketenagakerjaan
- b. Bahan informasi bagi peneliti lain yang hendak mengadakan penelitian dengan permasalahan yang sama.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini diutamakan oleh penulis dilingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Lombok Timur. Dan pada penelitian ini peneliti ingin lebih banyak mengetahui tentang faktor-faktor apa saja yang mendasari dan mempengaruhi perpanjangan kontrak tenaga kerja harian lepas di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Lombok Timur. Dan yang menjadi objek penelitian di penelitian ini tentunya tenaga kerja itu sendiri dan pihak-pihak yang terkait akan

masalah perpanjangan kontrak tenaga harian lepas di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Lombok Timur.

BAB III

METODE PENELITIAN



A. JENIS PENELITIAN

Dalam penelitian skripsi ini, jenis penelitian yang digunakan penyusun adalah jenis penelitian Hukum Normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari teori-teori dan konsep-konsep yang terhubung dengan masalah. Pendekatan normatif atau pendekatan kepustakaan adalah metode yang digunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada²¹. Norma hukum yang berlaku itu berupa norma positif yang tertulis berbentuk lembaga perundang-undangan, undang-undang, Peraturan pemerintah dan norma hukum tertulis yang berkepentingan.

B. METODE PENDEKATAN

Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis normatif. Yang disajikan dalam bentuk deskriptif yang dimana bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu dan pada saat tertentu yang terjadi pada masyarakat²². Untuk penelitian ini akan menggambarkan bagaimana kontrak kerja tenaga harian lepas di Dinas Lingkungan Hidup dan

²¹ Mukti Fajar, Yulianto Axhmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cet ke 3 (Yogyakarta :Pustaka Pelajar, 2015) hal 34

²² Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1982) hal 10

Kebersihan Kabupaten Lombok Timur ditinjau dari Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan

C. SUMBER DAN JENIS DATA

Berkaitan dengan permasalahan dan pendekatan masalah yang digunakan, maka prinsipnya penelitian ini menggunakan sumber data kepustakaan. maka prinsipnya penelitian ini menggunakan sumber data kepustakaan.²³ Dan jenis datanya adalah:

1. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan mempelajari dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas serta mempelajari peraturan perundang-undangan, dan buku-buku hukum.
2. Bahan hukum premier yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti peraturan perundang-undangan, isi dari perjanjian dan peraturan lain yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.
3. Bahan hukum sekunder yang merupakan bahan-bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum premier. Seperti buku atau literatur dan karya ilmiah dari kalangan hukum dan non hukum, peraturan pemerintah, rancangan undang-undang, naskah akademik.

²³ Mukti Fajar, Yulianto Axhmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cet ke 3 (Yogyakarta :Pustaka Pelajar, 2015), hal 174

D. TEKNIK DAN ALAT PENGUMPULAN DATA

Data dikumpulkan diperoleh dengan menggunakan metode pengumpulan data :

1. Studi literatur, dalam hal ini informasi dapat diperoleh dengan membaca buku dan dokumen yang sesuai dengan objek penelitian dan teori-teori yang berkaitan dengan penyusunan penelitian yaitu undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan dan perjanjian kerja yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Timur.
2. Dokumentasi, yaitu dengan menganalisa beberapa laporan atau sumber data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Lombok Timur dalam hal ini Surat Perjanjian kerja yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Timur.

Dalam penelitian hukum normatif²⁴, pengolahan bahan berujud kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Dalam hal ini pengolahan bahan dilakukan dengan cara melakukan seleksi data sekunder atau badan hukum dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis, tentu saja hal tersebut dilakukan secara logis, artinya ada hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lainnya untuk mendapatkan gambaran umum dari hasil penelitian.

²⁴ Mukti Fajar, Yulianto Axhmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cet ke 3 (Yogyakarta :Pustaka Pelajar, 2015) hal 181

E. ANALISIS DATA

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan cara menguraikan dan menjelaskan semua hasil jikian terhadap data yang berkaitan dengan permasalahan peneliti dalam bentuk kalimat-kalimat. Metode penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara induktif yaitu penatikan kesimpulan secara umum yang bersumber dari data bersifat khusus, sehingga memperoleh jawaban terhadap permasalahan penelitian²⁵.

²⁵ *Ibid*, hal 192

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah ditentukan pada penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kontrak yang digunakan pada Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kabupaten Lombok Timur hanya mengacu pada SK Kepala daerah dalam hal ini SK Bupati yang dimana disahkan juga oleh Bupati sendiri dan berlaku selama 1 tahun. Dan kontrak tenaga harian lepas tersebut dapat dikatakan bukan sebagai *tenaga outsourcing*. Karena tenaga kontrak dimaksud, dipekerjakan langsung dalam suatu hubungan hukum oleh pemerintah dengan seorang tenaga kerja melalui perjanjian kerja dalam hal ini SK yang dikeluarkan oleh Bupati Lombok Timur.
2. Kontrak kerja yang dikeluarkan oleh Kepala daerah Kabupaten Lombok timur jika ditinjau dari Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menggunakan sistem perjanjian kerja yang dibahas dalam undang-undang tersebut pada BAB IX pasal 51 dan pasal 52 tentang hubungan kerja, dan juga disertakan mengenai pengupahan dan pemutusan hubungan kerja yang memang sudah diatur di undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

Sesuai dengan rencana, visi, misi dan tujuan kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Lombok Timur dan dengan permasalahan pemungutan sampah rumah tangga dan industri di

Kabupaten Lombok Timur yang banyak. Maka pemerintah Kabupaten Lombok Timur ingin menunjang pembangunan terkait dibidang pengelolaan kebersihan dan pengaturan keindahan kota yang terprogram dan dilaksanakan dengan skala prioritas yang ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan dan apresiasi masyarakat menuju lingkungan yang tertib, indah dan menawan maka perlu dibentuk hubungan kontrak kerja untuk menunjang semua itu.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan dapat disarankan sebagai berikut ;

Pihak Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kabupaten Lombok Timur dan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur dihimbau untuk lebih memperhatikan sistem kerja dan sistem pengupahan tenaga kerja harian lepas pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Lombok Timur. Sebab beban kerja yang diberikan terhadap tenaga kerja harian lepas pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Lombok Timur relatif lebih berat dan lebih beresiko jika dibandingkan dengan instansi pemerintahan lainnya di kabupaten Lombok Timur.